

# AHMAD TAUFAN DAMANIK

Ketua Komnas HAM

RM - 9/1/19 (3)

## Sudah 4 Tahun Belum Ada Langkah Signifikan



tambahan, dan lain-lain masih ada berbagai kasus yang melibatkan masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan. Dalam hal pembangunan infrastruktur juga sama, kami menemukan beberapa kasus, di mana pembangunan itu justru menyebabkan masyarakat terpinggirkan. Solusi yang diberikan kerap tidak terpikirkan.

### Contohnya?

Misalnya kasus tempo hari di Kendal, dimana masyarakat setempat menolak karena kompensasinya tidak sesuai. Apraisalnya dianggap tidak dilakukan dengan baik, sehingga dia mengadu ke Komnas HAM. Kami sudah minta supaya tunggu dulu sampai ada mediasi, tapi ternyata

pihak-pihak lain. Sehingga mereka tidak hanya kehilangan haknya, tetapi juga mengalami berbagai tekanan tersebut. Semua itu sudah tuntas kami sampaikan semuanya kepada pemerintah. Nah, yang juga enggak kalah pentingnya adalah soal penanganan keberagaman. Indonesia ini kan negeri yang beragam. Karena itu sejak berdiri, dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, agar bisa mengaja kebhinekaan kita. Semuanya harus memiliki hak yang sama. Tetapi dalam kenyataannya, dari hari ke hari terjadi praktik tirani kriminalitas oleh mayoritas, terhadap minoritas. Ada kelompok tertentu yang merasa didiskriminasi, merasa kebhinekaan tidak dilaksanakan dengan benar. Misalnya masyarakat adat, dan kelompok-kelompok agama minoritas. Mereka bukan hanya didiskriminasi, tetapi juga dipersekusi. Tidak hanya kelompok Islam yang mendiskriminasi Kristen, tetapi kadang di tempat tertentu Islam juga didiskriminasi oleh Kristen. Atau di antara umat beragama yang sama juga bisa terjadi demikian.

**Anda tadi bilang sampai terjadi kriminalisasi di lapangan. Bisa dijelaskan seperti apa kriminalisasinya?**

Ya perusahaannya kan masih menjadi masalah. Jadi ada protes dari masyarakat kenapa mereka beroperasi, tetapi enggak memperhatikan dampak lingkungan. Sehingga sawah mereka jadi tidak produktif, rusak, dan sebagainya. Nah mereka protes itu. Mestinya kan terhadap rusaknya itu yang harus dicarikan jalan keluarnya, bukan malah mpidanakan mereka. Orang yang sedang memperjuangkan haknya itu malah dikriminalisasi, dengan tuduhan yang macam-macam dan tidak berdasar.

**Berarti secara keseluruhan menurut Komnas HAM penegakan HAM saat ini masih lemah ya?**

Ya kita sebetulnya punya banyak kemajuan. Di ASEAN kami dianggap sebagai negara kampiun HAM. Komnas HAM dalam pertemuan regional, selalu ditempatkan di negara yang sudah lebih maju. Filipina sekarang malah mengalami kemunduran. Thailand sekarang di bawah rezim militer. Jadi yang menonjol sekarang ya Indonesia. Tapi sebetulnya masih ada tantangan buat kita dalam berbangsa dan bernegara. ■ NDA

**BUYA Syafii menilai penegakan HAM di era Jokowi masih lemah. Kalau berdasarkan pandangan Komnas HAM bagaimana?**

Tergantung isunya ya. Kalau untuk pelanggaran HAM berat, memang kami masih mengkritisi, karena sudah empat tahun berjalan, belum kelihatan langkah yang betul-betul signifikan. Terutama dalam meneruskan 10 berkas penyelidikan, yang sudah diberikan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung. Sampai hari ini kan itu belum ada perkembangannya.

**Kalau untuk kasus HAM ringan bagaimana?**

Bukan ringan, yang biasalah ya. Dalam hal ini kami melihat memang ada beberapa perkembangan. Misalnya pemerintah sudah membentuk tim reforma agraria, ada perpres penanganan masalah agraria, lalu ada kebijakan untuk perhutanan sosial, dan lain-lain. Itu semua kami apresiasi sebagai langkah yang baik. Tetapi kami juga masih melihat ada berbagai masalah di lapangan, khususnya terkait dengan investasi. Misalnya investasi perkebunan, per-

pelaksanaan proyeknya jalan terus. Lalu di Kulonprogo juga sempat terjadi konflik. Komnas HAM sudah turun ke sana untuk memediasi, karena ada warga yang belum bersedia menerima kompensasi, karena merasa tidak adil. Tapi sebagian yang lain sudah menerima kompensasi dan relokasi. Yang juga cukup memprihatinkan itu adanya kriminalisasi terhadap petani, dan tokoh aktivis agraria. Masalah ini sudah mendapat perhatian dari kalangan internasional. Kami sudah dapat banyak surat dari luar negeri, yang menanyakan kenapa ada orang yang memperjuangkan hak mereka karena dirugikan suatu tambang misalnya, tapi justru dipidanakan dengan tuduhan macam-macam. Ada berbagai kasus seperti itu.

**Jadi secara keseluruhan seperti apa penilaian Komnas HAM?**

Jadi satu sisi ada kebijakan yang kami lihat sudah progresif, tapi di sisi lain masih ada kasus-kasus seperti ini, di mana kadang-kadang terjadi kekerasan di lapangan. Petani mengalami kekerasan dari aparat atau preman yang dikerahkan, atau